

KOMITMEN LBH MUHAMMADIYAH

Layani Masyarakat Perjuangkan Keadilan



KR-Istimewa

Emil Dardak selaku ahli waris Achmad Hermanto Dardak menerima santunan dari Jasa Raharja.

UNTUK ACHMAD HERMANTO DARDAK Jasa Raharja Beri Santunan

SEMARANG (KR) - Jasa Raharja telah menyerahkan santunan kepada Emil Dardak selaku ahli waris Achmad Hermanto Dardak, korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di ruas Pemalang-Batang Jawa Tengah, Sabtu (20/8) lalu. Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, mengatakan korban terjamin Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

"Kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah tersebut. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan," ungkap Dewi Aryani dalam rilis yang diterima *KR*, Senin (22/8). Santunan diserahkan kepada putra Almarhum, Emil Dardak yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur.

Diungkapkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017, Jasa Raharja menjamin santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris yang sah. "Untuk satu orang korban luka, kami juga telah menerbitkan jaminan biaya perawatan ke RSU Aro, tempat korban dirawat. Santunan dapat diserahkan kurang dari 24 jam kepada ahli waris. Ini sebagai wujud kehadiran negara melalui Jasa Raharja," ungkap Dewi.

Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang Undang Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan. Itu merupakan salah satu bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan," tandas Dewi Aryani. **(Zie)-d**

KARANGANYAR (KR) - Para advokat yang tergabung di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah berkomitmen melayani masyarakat marginal dalam memperjuangkan keadilan. Hal itu disepakati dalam Rakornas LBH PP Muhammadiyah yang diselenggarakan di Hotel Lorin Syariah, Sabtu-Minggu (20-21/8).

Direktur LBH PP Muhammadiyah, Taufiq Nugraha mengatakan organisasinya siap membantu pendirian LBH Muhammadiyah di semua kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. Sejauh ini, baru 14 provinsi yang memiliki lembaga tersebut. Itupun belum merata di semua daerah tingkat II. Keberadaan LBH Muhammadiyah diyakini mampu membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan di mata hukum, khususnya masyarakat miskin. "Prinsip utama Muhammadiyah memberi solusi ketika akses pen-

didikan terhambat, ada sekolah. Lalu hambatan akses kesehatan, kita punya RS. Nah, yang terkendala hukum, Muhammadiyah punya LBH. Bagi yang tak punya uang bayar lawyer, kita tak memungut biaya. LBH Muhammadiyah profesional mendampingi kliennya meski tak dibayar. Kebutuhan kami sudah dicukupi PDM," katanya kepada wartawan di sela Rakornas.

Pembentukan LBH Muhammadiyah secara menyeluruh dan terpenuhi legalitas, ditarget selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah, November 2022. Dalam rakornas, seluruh tamu undangan menyepakati percepatan pembentukan LBH berikut legalitas serta menganalisa problem spesifik di daerah masing-masing. LBH Muhammadiyah siap mendampingi warga tidak mampu tanpa memungut biaya sepeserpun. "Kerja kami sebagai lawyer, ha-

nya butuh kesediaan klien menguasai perkaranya ke kami. Meski baru dua tahun berjalan, LBH Muhammadiyah komitmen membantu kaum marginal dalam memperjuangkan keadilan," tandas Taufiq Nugraha.

Ketua Pelaksana Rakornas LBH PP Muhammadiyah, Ponxi Yoga Wiguna mengatakan rakornas per-

dana ini dihadiri 200 undangan dari advokat, LBH Muhammadiyah seluruh Indonesia, perwakilan institusi penegak hukum seperti dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, Ombudsman dan Ketua PP Muhammadiyah. Kegiatan selama dua hari ini Sinergi LBH Muhammadiyah dalam Amal Ma'ruf Nahi Munkar. **(Lim)-d**



KR-Abdul Alim

Pembukaan Rakornas LBH PP Muhammadiyah di Karanganyar.

HARYANTO-SAIFUL ARIFIN BERPAMITAN

Ajak Semua Pihak Seduluran Selawase

PATI (KR) - Penetapan dan pelantikan Penjabat Bupati Pati 2022-2024, dinilai para pengamat politik, merupakan kekalahan politik ketiga (hatrick) DPRD Pati, secara beruntun. Sementara itu, Bupati H Haryanto mengajak semua elemen masyarakat untuk menjalin *paseduluran selawase*.

"Saya sudah melaksanakan tugas secara maksimal sebagai Bupati Pati selama 10 tahun. Tentu saja ada kelebihan, dan sekaligus kekurangan," ujarnya saat ditemui pada acara kirab budaya yang berlangsung di Alun-alun Juwana, Minggu (21/8). "Saya ingin mengajak seduluran selawase (red - persaudaraan selamanya) teman-teman semua," ucap Haryanto menahan perasaan haru.

Sebagaimana diberitakan media ini, pasangan Bupati Pati Haryanto dan wakilnya, Saiful Arifin mengakhiri jabatannya, pada Senin (22/8). Berdasar SK Mendagri Tito Charnavian, nomer 131.33-5517 tertanggal 12 Agustus 2022, ditetapkan Henggar Budi Anggoro (kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng) sebagai penjabat hingga pelantikan Bupati Pati definitif 2024 mendatang.

"Pelantikan Henggar Budi Anggoro (HBA) sebagai Pj bupati Pati, dijadwalkan akan berlangsung di kantor Gubernur Jateng di

Semarang, Senin (22/8) malam" kata ketua DPRD Pati, H Ali Badrudin SE. Sementara itu, sejumlah pengamat politik di Pati menilai, munculnya dan penetapan HBA sebagai Pj bupati, merupakan kekalahan hatrick DPRD Pati.

"Sebelumnya, dewan (legislatif) kalah saat pengusungan pemilihan jabatan sekretaris daerah. Serta pada rencana pengusulan hak angkat yang batal, ketika kisruh pemilihan perangkat desa. Pada penjarangan calon Pj, dewan mengusulkan 3 nama," ungkap Fatkurchman SH MH.

Menurut pengamat politik asal Kayen ini, lembaga DPRD Pati terkesan seperti 'macan ompong,, yang tidak mempunyai visi. "DPRD sebagai lembaga politik,

maka sebelum mengusulkan calon penjabat didaerahnya, tentu saja harus melalui penjarangan, sehingga bisa memunculkan calon terbaik guna memimpin daerah," ucap Fatkurchman.

Ketua Presidium LSM Dewan Kota, drs H Pramudya menyatakan penetapan HBA sebagai Pj bupati Pati merupakan pilihan politik bijak dari Gubernur Ganjar Pranowo. "Mungkin Pak Gubernur melihat tensi hubungan politik eksekutif-legislatif di Pati yang menurut masyarakat cukup 'gemreges". Sehingga dengan penetapan Pj bupati yang orang baru dan cenderung netral, maka diharapkan hubungan eksekutif-legislatif menjadi baik dalam koridor fungsi dan tugas masing-masing," ucap Pramudya. **(Cuk/Bdi)-d**

HUKUM

Pria Gangguan Jiwa Aniaya Ayah Hingga Tewas



KR-Jarot Sarvosambodo

Warga menandu jenazah almarhum Basori sebelum dimakamkan.

PURWOREJO (KR) - Pria penyandang gangguan jiwa berinisial Im (30) warga Desa Aglik, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, menganiaya ayahnya, Basori (58), hingga tewas, Jumat (19/8). Korban dianiaya sepulang salat Subuh berjamah di masjid desa.

Kepala Desa Aglik, Sulasmono, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.00. "Korban bersama istrinya, yakni ibu pelaku, juga bersama pelaku Im, berangkat salat Subuh di masjid," ungkapnya kepada *KR*.

Setelah salat, korban bersama pelaku pulang ke rumah yang berjarak hanya 50 meter dari masjid. Sementara sang ibu meneruskan zikir di masjid. Penganiayaan terjadi di rumah, di mana ketika kejadian hanya ada korban dan pelaku. "Pengakuan pelaku, korban dipukul dengan kayu beberapa kali pada bagian kepala," tuturnya.

Peristiwa itu baru diketahui ketika istri korban pulang ke rumah. "Istri korban pulang melihat suaminya sudah tergeletak dan bertanya kepada

pelaku. Pelaku bilang ia jengkel dengan ayahnya, tapi alasannya apa tidak tahu," terangnya.

Saksi kemudian meminta tolong kepada tetangganya, dan pelaku diamankan. Pemerintah desa melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gebang. Menurutnya, pelaku memang menyandang gangguan jiwa dan menjalani pengobatan rutin. "Dulu pernah kami bawa dan rawat di rumah sakit, lalu pulang setelah kondisinya dinilai stabil. Tapi harus minum obat rutin," ucapnya.

Pihak keluarga, katanya, menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan tidak melanjutkan proses hukum. "Jenazah dimakamkan di pemakaman desa," tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Gebang Iptu Madrim Suryantoro membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku untuk sementara diamankan di Polres Purworejo. "Benar kami mendapat laporan ada dugaan penganiayaan yang dilakukan Im terhadap orangtuanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelaku alami gangguan jiwa," ujarnya. **(Jas)-d**

JAJARAN POLDA JATENG BERANTAS PEKAT

Sehari, Tangkap 256 Bandar dan Penjudi

SEMARANG (KR) - Gebrakan dalam memerangi penyakit masyarakat terutama perjudian di wilayah hukum Polda Jateng terus digalakkan. Bahkan, dalam sehari sejak Kapolri mengeluarkan instruksi pemberantasan permainan untung-untungan itu Polda Jateng telah mengungkap 112 Kasus perjudian dengan 256 tersangka dan 24 diantaranya berperan sebagai bandar.

Selain mengamankan 256 tersangka, polisi juga disita sarana alat judi seperti alat dadu, kartu remi, buku rekap togel, mesin judi, ponsel serta ponsel untuk sarana judi online dan uang tunai Rp 72,2 juta sebagai barang bukti. Hal itu disampaikan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, Senin (22/8).

Secara rinci Kapolda menjelaskan, bentuk perjudian yang diungkap yakni judi online 18 kasus, togel 43 kasus dan gelanggang permainan termasuk to let dan judi kopyok 51 kasus. Dijelaskan pula 2 kasus judi online yang diungkap dari Purbalingga dan Pemalang merupakan jaringan judi internasional.

"Dari kasus ini ada yang jaringan internasional yakni Purbalingga dan Pemalang, keduanya mempunyai server di Thailand dan Kamboja. Di Pemalang bahkan menggunakan jasa endorse selebgram sebagai sarana promosinya," jelasnya.

Sementara tersangka RM seorang wanita dalam kerjanya atas perintah manager di Bandung mengaku tugasnya di Pemalang hanya menawarkan link judi online dengan upah Rp 7 juta.

Menurut Kapolda sebelumnya pada periode Januari sampai Juli 2022 jajaran Polda Jateng telah berhasil mengungkap lebih banyak kasus judi, yakni 224 kasus dan mengamankan 381 tersangka.

"Jadi selama Januari sampai Juli 2022 jajaran Polda Jateng mengungkap 224 kasus

judi dan mengamankan 381 tersangka. Dan, sekarang sehari kami telah ungkap 112 Kasus perjudian dengan 256 tersangka. Jumlah ini hasil penindakan di 35 Polres di wilayah Jateng," jelas Kapolda.

Pucuk pimpinan jajaran Polda Jateng itu mengakui jumlah tersangka berbagai kasus judi mulai dari yang tradisional seperti dadu, sambung ayam, remi, toto gelap hingga judi online di tiap daerah Jateng tidak sama.

Seperti terlihat pada saat jumpa pers yang setiap Polres mendatangkan tersangka dengan jumlah berbeda. Ada yang satu tersangka seorang wanita, seperti Polrestabes Semarang dan ada Polres yang mendatangkan tersangka lebih dari lima seperti Pati dan Purbalingga.

Kapolda mengatakan sesuai

laporan para penjudi di Kota Semarang dengan adanya tindakan tegas perang terhadap judi, rupanya mereka mengambil sikap 'tiarap' tidak berani buka praktek.

Namun, dibalik itu kapolda menyinggung dalam penanganan kasus judi tidak bisa digambarkan seperti lomba di tiap Polres banyak-banyak tersangka. Tapi, yang peling penting masyarakat sadar tidak lagi berjudi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Polda Jateng, maraknya kasus perjudian akhirnya ini dikarenakan adanya oknum masyarakat yang mencari solusi instan dari kesulitan ekonomi yang dialaminya selama masa pandemi.

"Berlatar karena kesulitan ekonomi selama masa pandemi dan tergiur iming-iming hasil lebih sebagai bandar judi, akhirnya mencari jalan pintas

dengan berjudi, untung-untungan dan berharap kaya mendadak," ungkapnya.

Oleh karena itu, Kapolda menyebutkan bahwa penindakan kasus judi tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada masyarakat agar menjauhi segala bentuk kegiatan perjudian. "Kita tidak bangga menindak masyarakat, tapi lebih kepada memberikan pembinaan bahwa judi adalah perbuatan yang melanggar hukum serta dilarang dalam agama. Segala bentuk perjudian pasti akan kami tindak," tuturnya.

Guna memberantas seluruh aktivitas perjudian di masyarakat, Polda Jateng telah melakukan beberapa upaya di antaranya menggunakan cara preventif dan preemtif yang melibatkan pihak internal dan eksternal. "Kami melibatkan internal oleh seluruh satker dan jajaran serta dari pihak eksternal baik tokoh masyarakat, agama dan sebagainya untuk memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat agar menjauhi segala bentuk aktifitas perjudian," ujar Kapolda.

Adapun cara represif disebatkan Kapolda merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk memberikan efek jera pada masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa Polda Jateng dan Jajarannya tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian serta wujud polri hadir dalam menjaga Harkamtibmas.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 25 juta. Sedangkan bagi bandar judi online dikenakan tambahan Pasal 27 ayat (2) UU ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp. 25 milyar. **(Cry)-d**



KR-Karyono

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi minta keterangan salah satu tersangka judi online.